

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. BUKU

- Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar grafika, Jakarta
- Bagir Manan, 1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Diana Halim Koencoro, 2004, *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Indroharto, 1994, “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik,” dalam Paulus Efendie. *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Alfabeta, Bandung.
- Jum Anggriani, 2011, *Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah*. Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta.
- Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, NTB.
- Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*. Yuridika, Surabaya.
- Philipus M. Hadjon, 1998, *Penataan Hukum Administrasi*. Fakultas Hukum Unair, Surabaya.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*. Prenada Media, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Pranadamedia Groub, Jakarta.
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo, Jakarta.
- Setio Sapto Nugroho, 2009, *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dokumentasi dan Informasi Hukum*, Bagian Hukum, Biro Hukum dan Humas, Jakarta.
- Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia, Jakarta.

S.P. Siagan, 2014, *Filsafat Administrasi*. Sinar Aksara, Jakarta.

Stout HD., “De Betekenissen van de wet”, dalam Irfan Fachruddin. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung.

Suriansyah Murhaini, 2014, *Manajemen Pengawasan Pemerintah Daerah*. *Pustaka Pelajar*, Yogyakarta.

S.P. Siagan, 2014, *Filsafat Administrasi*. Sinar Aksara, Jakarta.

Victor dan Jusuf Juhir, 1994, *Aspek Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, PT. Rineka Cipta, Jakarta

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Menteri Pariwisata Republic Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

## **C. Jurnal**

Desi Arianing Arrum, 2019, “Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Indonesia”, *Jurist-Diction Journal*, Vol. 2, No. 5, 2019.

Karina Tri Ambarsari dan Mahendra Wardhana, 2021, “Penegakan Hukum Administratif Terhadap Pelaku Usaha Coffee Shop Di Kota Surabaya Terkait Kewajiban Mempunyai Tanda Daftar Usaha Pariwisata.”, *Novum : Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2021.

Muhammad Zulfan Hakim, 2017, “Izin sebagai pengawasan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik”, *Jurnal Hukum Islah*, Vol. 13, No. 29, 2017.

Philipus M. Hadjon, 1997, “Tentang Wewenang.” *Jurnal Yuridika*, Vol. 7, No. 5 dan 6, 1997.